



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 November 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINAB SYAR'ITYAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 84482

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.020.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/36 m² di KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 400 m² di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. Tanah Seluas 20.000 m² di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/200 m² di KOTA BANJARMASIN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 323.000.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1,5 E M CVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU AYL A Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 88.050.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 10.696.702****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.441.746.702**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.441.746.702

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.